**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

Pemutakhiran data kependudukan adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah guna terciptanya tertib administrasi kependudukan, dimana dalam pelaksanaannya pegawai pemerintahan melakukan pendataan masyarakat di suatu wilayah untuk keperluan dokumentasi dan memperbaharui data kependudukan. Pemutakhiran data diperlukan agar masyarakat mempunyai identitas diri yang sebenarnya, terdata sebagai masyarakat asli Indonesia, tidak mempunyai identitas ganda, dan menghindari pemalsuan dokumen-dokumen.

Selain itu, pemutakhiran data juga mempunyai tujuan sebagai informasi mengenai status kependudukan masyarakat di wilayah tersebut seperti contohnya pertambahan penduduk di suatu wilayah dengan berbagai aspek seperti kelahiran, adanya masyarakat yang baru menginjak usia 17 tahun, kedatangan warga baru yang berniat untuk menetap di daerah tersebut, serta perpindahan kewarganegaraan. Di sisi lain, pengurangan penduduk juga sangat mempengaruhi pemutakhiran data, seperti kematian, adanya perpindahan masyarakat ke daerah lain, dan pindah kewarganegaraan. Hasil dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil akan membentuk data sistem informasi kependudukan yang kemudian menyediakan informasi kependudukan dari setiap orang yang terdaftar dan menjadi dasar statistik kependudukan. Selebihnya tujuan dilaksanakannya tertib administrasi kependudukan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pertama, Tertib Database Kependudukan meliputi terbangunnya database kependudukan yang akurat di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat; database kependudukan Kabupaten/ Kota tersambung (online) dengan Provinsi dan Pusat dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); database kependudukan Depdagri dan daerah tersambung (online) dengan instansi pengguna.
2. Kedua, Tertib Penerbitan NIK meliputi NIK diterbitkan setelah penduduk mengisi biodata penduduk per keluarga dengan menggunakan SIAK; tidak adanya NIK ganda; pemberian NIK kepada semua penduduk harus selesai akhir tahun 2011.
3. Ketiga, Tertib Dokumen Kependudukan (KK, KTP, Akta Pencatatan Sipil) meliputi prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; tidak adanya dokumen kependudukan ganda dan palsu.

Pelaksanakan pemutakhiran data tentu dilakukan sesuai dengan dasar hukum yang ada seperti UU no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres NO. 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional, dan Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009.

Data kependudukan yang dihimpun dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjadi data agregat penduduk yang meliputi himpunan data perseorangan berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data Kependudukan tersebut digunakan untuk semua keperluan berasal dari Kementerian Dalam Negeri (pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013), antara lain dimanfaatkan untuk :

1. Pelayanan publik antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan jaminan sosial tenaga kerja.

2. Perencanaan pembangunan yakni untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

3. Alokasi anggaran meliputi penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan perhitungan potensi perpajakan.

4. Pembangunan demokrasi yaitu penyiapan Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK2) dan penyiapan data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

5. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang dan mencegah pengiriman tenaga kerja illegal.

Dalam melakukan pemutakhiran data di RW 10, ketua RW selalu melakukan koordinasi dengan pihak dari kelurahan dan memberikan perbaharuan data kepada pihak kelurahan setiap bulan, yang dimana selanjutnya pihak kelurahan akan menyerahkan berkas yang diberikan RW kepada kecamatan. Tentu dalam melaksanakan tugas yang saling berkaitan antara kecamatan, kelurahan dan RW dibutuhkan koordinasi yang terjalin dengan baik agar tidak terdapat miskomunikasi dalam penyampaian dan kesalahan dalam melaksanakan tugas.

Koordinasi di dalam melakukan atau melaksanakan suatu kegiatan adalah suatu hal yang sangat penting bagi setiap organisasi ataupun kelompok, karena koordinasi diperlukan guna terciptanya keteraturan dalam mencapai tujuan dan terciptanya sinkronisasi agar tercapai tujuan dan kepentingan bersama, sehingga tidak terjadi kesalahan atau meminimalkan kesalahan. **James D. Mooney** berpendapat bahwa koordinasi adalah susunan yang teratur dari usaha kelompok, untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama.

RW10 yang termasuk kedalam wilayah kelurahan Malabar kecamatan Lengkong, dalam setiap bulan selalu melakukan pembaharuan data kependudukan. Data yang diperoleh merupakan hasil dari laporan RT yang termasuk ke dalam wilayah RW 10 dan membantu tugas RW dalam melakukan pendataan penduduk, selain itu juga data dapat diperoleh dari warga yang mengajukan permohonan untuk pembuatan KK, KTP dan dokumen kependudukan lainnya yang nantinya diberikan kepada kelurahan untuk disampaikan ke kecamatan.

Sesuai dengan peraturan, dalam melakukan segala permohonan administrasi kependudukan, sebelum mendatangi kantor kelurahan dan kecamatan, warga harus mendatangi RW dimana warga itu tinggal terlebih dahulu untuk mendapatkan surat pengantar dari RW, hal ini dilakukan dengan tujuan menciptakan tertib administrasi kependudukan, sehingga RW dapat meringankan tugas dari kelurahan dalam pemutakhiran data kependudukan, selain itu juga pendataan masyarakat dapat terus terperbarui dan data yang diperoleh mengenai jumlah penduduk disuatu wilayah dapat akurat.

Koordinasi pihak kecamatan dengan pihak kelurahan maupun pihak kelurahan dengan mitra kerjanya yaitu RW, harus dapat terjalin dengan baik agar tidak ada miskomunikasi sehingga tujuan dalam memutakhirkan data dapat terealisasikan dengan baik. Namun untuk saat ini kenyataanya data yang ada masih dapat dikatakan belum akurat, hal ini dapat dilihat dari jumlah rekapitulasi data kependudukan yang peneliti dapatkan dari RW dan kelurahan sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jumlah** | | **Jumlah UMPI** | | | **Jumlah Penduduk** | | | **Jumlah Menurut Golongan Agama** | | | | | |
| **RT** | **RW** | **WNI** | **WNA** | **JMLH** | **LK** | **PR** | **JMLH** | **ISLAM** | **KRSTN** | **KHTLK** | **HNDU** | **BDHA** | **JMLH** |
| 10 | 7 | 10 | 219 | - | 219 | 469 | 816 | 1286 | 1197 | 46 | 43 | - | - | 1286 |

*Sumber: Daftar Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah RT, RW dan Golongan Agama Kelurahan Malabar (Maret 2016)*

**Tabel 1.2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **RW** | **Jumlah** | | **Jumlah UMPI** | | | **Jumlah Penduduk** | | | **Jumlah Menurut Golongan Agama** | | | | | |
| **RT** | **RW** | **WNI** | **WNA** | **JMLH** | **LK** | **PR** | **JMLH** | **ISLAM** | **KRSTN** | **KHTLK** | **HNDU** | **BDHA** | **JMLH** |
| 1 | 10 | 7 | 10 | 259 | - | 259 | 427 | 459 | 886 | 828 | 41 | 14 | - | 3 | 886 |

*Sumber: Laporan Kependudukan RT/RW Triwulan RW10 Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong (Maret 2016)*

Dari data yang peneliti tampilkan diatas, dapat terlihat ketidaksamaan data yang ada di RW dan Kelurahan. Terhitung perbedaan jumlah penduduk mencapai 400 jiwa, hal ini tentunya mengherankan dan bagaimana bisa data yang ada dapat berbeda dengan cukup signifikan. Diungkapkan oleh pegawai kecamatan, kelurahan dan RW yang membenarkan masih adanya kekurangan didalam memutakhirkan data yang ada. Hal-hal yang dapat menjadi penyebab terjadi perbedaan didalam data kependudukan adalah adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh pihak kelurahan atau RW, adanya data yang dipakai oleh pihak kelurahan adalah data yang masih lama bukan data yang baru dari RW, terkadang masih ada juga salah dalam mengartikan tugas yang diberikan, dikarenakan kurangnya pengetahuan akan tugasnya yang ada dan ketidakpahaman akan koordinasi yang diberikan.

Pemutakhiran data kependudukan sangat diperlukan, karena apabila masyarakat tidak terdata oleh pemerintah setempat dapat dikhawatirkan penduduk tersebut tidak bisa mendapatkan pelayanan dari instansi pemerintahan yang lain, atau bisa pula masyarakat tersebut termasuk kedalam pelaku tindak pidana, selain itu juga manfaat lain pemutakhiran data yaitu untuk mengetahui jumlah kepadatan penduduk yang ada di wilayah tersebut dan mendata masyarakat agar terinput ke dalam sistem. Maka dari itu koordinasi yang dilakukan oleh kecamatan sampai RW harus terjalin dengan baik untuk tercapainya kepentingan dan tujuan bersama.

Dengan telah dikemukakannya permasalahan yang ada diatas, maka peneliti memutuskan untuk mengambil judul yaitu **“Koordinasi Kelembagaan Dalam Pemutakhiran Data Kependudukan Studi RW10 Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong Kota Bandung”**

* 1. **Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mencoba memfokuskan penelitian terhadap :

1. Bagaimana koordinasi yang terjalin di dalam melakukan pemutakhiran data kependudukan?
2. Apa yang menjadi penghambat dalam mewujudkan pemutakhiran data kependudukan?
3. Bagaimana cara menanggulangi hambatan dalam mewujudkan pemutakhiran data kependudukan?
   1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
      1. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan suatu arah yang hendak dicapai peneliti. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui serta memahami secara mendalam mengenai koordinasi kelembagaan dalam pemutakhiran data kependudukan adalah :

1. Mengetahui koordinasi kelembagaan dalam pencapaian tujuan pemutakhiran data.
2. Mengetahui faktor – faktor apa saja yang menghambat dalam pemutakhiran data yang dilakukan RW, Kelurahan dan kecamatan.
3. Mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam mewujudkan pemutakhiran data kependudukan.
   * 1. Kegunaan Penelitian
        1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan pengetahuan, khususnya koordinasi yang diperoleh langsung dari lapangan, dan menemukan solusi dari fenomena yang terjadi mengenai Koordinasi Kelembagaan Dalam Pemutakhiran Data Kependudukan.

1.3.2.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan sosial pada masyarakat akan koordinasi kelembagaan dalam pemutakhiran data kependudukan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan yang bermanfaat kepada Kelurahan dan Kecamatan agar bisa menjadi lebih baik lagi dalam melaksanakan pekerjaan.

* 1. **Kerangka Pemikiran**
     1. **Koordinasi**

Koordinasi adalah penyelarasan secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi menurut Drs. **Soewarno Handayaningrat** yang dikutip oleh **Moekijat (1994:6)** bahwa koordinasi adalah

**“Usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda, agar kegiatan daripada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usaha-usaha secara maksimal, agar diperoleh hasil secara keseluruhan”**

Adapun Ciri-ciri koordinasi menurut **Drs. Soewarno Handayaningrat** yang dikutip oleh **Moekijat (1994:42)** adalah

1. **Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan.**

Koordinasi menjadi wewenang dan tanggung jawab daripada pimpinan. Pimpinan yang berhasil, adalah pimpinan yang melakukan koordinasi dengan baik.

1. **Koordinasi adalah proses yang terus-menerus.**

Suatu proses yang bersifat kesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.

1. **Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur.**

Koordinasi adalah konsep yang diterapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang bekerjasama di dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

1. **Konsep kesatuan tindakan.**

Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha/tindakan-tindakan daripada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam mencapai hasil bersama.

1. **Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama.**

Kesatuan usaha/tindakan meminta kesadaran/pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok di mana mereka bekerja.

* 1. **Lokasi dan Lama Penelitian**
     1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di RW 10, Kelurahan Malabar, dan Kecamatan Lengkong Kota Bandung.

1.5.2 Lamanya Penelitian

Lamanya penelitian dilakukan 6 bulan terhitung sejak bulan Januari 2016 hingga Juni 2016. (Jadwal Kegiatan Terlampir)